

## **Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung**

Influence Analysis of Fiscal Decentralization on Regional Financial Performance in Bandar Lampung

Valendya Rilansari, S.P.W.K.<sup>1</sup>, Zulqadri Ansar, S.T., M.T.<sup>2</sup>, Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.<sup>3</sup>

**Abstrak.** Terjadinya penerapan sistem desentralisasi fiskal karena adanya otonomi diharapkan untuk setiap daerah dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan daerah. Namun setiap daerah termasuk Kota Bandar Lampung masih belum tuntas dalam mencapai tujuan-tujuan diadakannya desentralisasi fiskal tersebut salah satunya yaitu masih belum tercapainya indikator kinerja daerah dilihat dari peningkatan nilai PAD tiap tahun. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan korelasi. Adapun hasil dari analisis didapatkan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan dari Dana Perimbangan terhadap PAD di Kota Bandar Lampung yang juga selanjtnya dapat diketahui pusat-pusat pertumbuhan melalui PAD untuk sektor publik maupun sektor swasta.

*Kata Kunci: desentralisasi fiskal, kinerja keuangan daerah, pertumbuhan kota*

**Abstract.** The implementation of fiscal decentralization system because of the expected autonomy for each region can improve and develop regional capacity. However, every region, including Bandar Lampung City, is still incomplete in achieving the objectives of fiscal decentralization, which is that regional performance indicators have not yet been achieved, seen from the increase in the annual PAD value. So that the purpose of this study is to analyze the effect of fiscal decentralization on regional financial performance in Bandar Lampung City by using multiple linear regression and correlation methods. The results of the analysis found that there was a significant influence from the balancing fund on PAD in Bandar Lampung City which also could later be known to growth centers through PAD for the public sector and the private sector.

*Keywords: fiscal decentralization, regional financial performance, urban growth*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami perubahan sistem pemerintahan yaitu dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Pada saat Indonesia menganut sistem sentralisasi seluruh aktivitas kepentingan daerah tidak boleh berbeda dengan kepentingan pusat. Setelah sejak era reformasi tahun 1999 Indonesia mengeluarkan kebijakan desentralisasi dimana arti desentralisasi menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia [1].

Desentralisasi fiskal yang terdapat pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan mengimplementasikan bagaimana pemerintah pusat memberikan bantuan dalam hal keuangan yang disebut sebagai dana perimbangan [2]. Sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) yang didalamnya terdiri atas pajak, cukai dan sumber daya alam [3]. Indonesia sejak diterapkannya desentralisasi fiskal terjadi proses pengalihan keuangan untuk dana perimbangan dengan jumlah yang signifikan dan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 saat desentralisasi mulai aktif dilaksanakan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan sebesar Rp. 33,07 triliun dan pada tahun 2016 meningkat sebesar 31,69% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 639,76 triliun [4].

Sehubungan dengan besaran dana perimbangan dari pemerintah pusat yang semakin meningkat setiap tahunnya menjadi kesempatan setiap daerah untuk mengembangkan ekonomi, sosial budaya dan fisik daerahnya. Sesuai dengan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah dimana mengandung tiga visi utama yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan [5]. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa dalam penerapan desentralisasi fiskal pemerintah pusat memberikan transfer dana berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kualitas daerahnya termasuk salah satunya kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Jika dilihat dari indikator kinerja daerah yaitu PAD dimana capaian peningkatannya rata-rata 20% per tahun, proporsi PAD Kota Bandar Lampung masih cukup jauh dibawahnya meskipun terjadi kenaikan besaran nilai PAD setiap tahunnya. Peningkatan nilai PAD Kota Bandar Lampung yang terlihat signifikan terjadi direntang tahun 2010-2012. Peningkatan yang dicapai pada tahun 2011 dari tahun sebelumnya sebesar 46,73% dan pada tahun 2012 dari tahun sebelumnya sebesar 45,52%. Dalam rangka mengetahui adanya sistem desentralisasi fiskal ini terhadap PAD di Kota Bandar Lampung, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang dikaji lebih jauh bagaimana dampak dari

adanya kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah berdasarkan nilai PAD di Kota Bandar Lampung.

## II. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan mengikuti kebutuhan atas sasaran yang akan dianalisis. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu tiga jenis dana perimbangan Kota Bandar Lampung berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan dilihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan daerah dengan ukuran besaran nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber atau diperoleh dari publikasi yang dilakukan oleh lembaga statistik terkait yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung berupa buku kota dalam angka dan juga data dari beberapa instansi terkait yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis untuk menjelaskan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya untuk memberikan penjelasan mengenai kajian analisis dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap nilai PAD di Kota Bandar Lampung. Analisis ini dijelaskan dengan mengukur pengaruh dari desentralisasi fiskal dengan adanya dana perimbangan berupa DAU, DAK dan DBH di Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2012-2016. Ketiga jenis dana perimbangan tersebut dilihat bagaimana hubungannya dengan kinerja keuangan daerah berdasarkan nilai PAD dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda [6].

Analisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap PAD di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan pendekatan regresi berganda dijelaskan seperti berikut.

- Perumusan Analisis Regresi Linier

Analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ekonomi perkotaan berdasarkan PAD di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan pendekatan analisis regresi linier berganda yang dibuat persamaan [7],

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + e$$

dengan rincian sebagai berikut.

y = PAD (Pendapatan Asli Daerah)

$a_0$  = konstanta

$x_1$  = DAU (Dana Alokasi Umum)

$a_{1-7}$  = koefisien regresi

$x_2$  = DAK (Dana Alokasi Khusus)

e = komponen mewakili faktor lain

$x_3$  = DBH (Dana Bagi Hasil)

Analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah dalam ukuran PAD di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui pendekatan regresi berganda dan juga pendekatan korelasi.

Regresi yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan koefisien korelasi yang digunakan yaitu analisis koefisien korelasi *pearson* karena jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data interval/rasio dengan 3 variabel independen atau variabel bebas dan jenisnya *time series* dengan kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2012-2016.

Kuatnya hubungan antarvariabel yang dihasilkan dari analisis korelasi dapat diketahui berdasarkan besar kecilnya koefisien korelasi yang harganya minus satu (-1) sampai dsengan plus satu (+1). Koefien korelasi yang mendekati minus 1 atau plus 1, berarti hubungan variabel tersebut sempurna negatif atau sempurna positif. Bila koefisien korelasi (*r*) tinggi, pada umumnya koefisien regresi (*b*) juga tinggi, sehingga daya prediktifnya akan tinggi. Bila koefisien kolerasi minus (-), maka pada umumnya koefisien regresi juga minus (-) dan sebaliknya. Jadi antara kolerasi dan regresi terhadap hubungan yang fungsional sebagai alat untuk analisis [6].

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja keuangan daerah Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung

*Pearson correlation* akan menunjukkan seberapa besar hubungan antara variabel independen dan dipenden. Semakin mendekati 1 maka hubungan antar variabel dependen dan independen semakin kuat, sementara apabila nilai menyatakan kurang dari 0,05 maka tidak adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dependen dan independen tersebut [8].

**Tabel 1**  
**Correlations**

	PAD	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Dana Bagi Hasil
Pearson Correlation				
PAD	1.000	.992	.804	.976
Dana Alokasi Umum	.992	1.000	.745	.946
Dana Alokasi Khusus	.804	.745	1.000	.833
Dana Bagi Hasil	.976	.946	.833	1.000

Dari tabel di atas dapat diketahui yang paling mempengaruhi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,992 atau 99,2 persen yang selanjutnya diikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 0,976 atau 97,6 persen. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya memiliki nilai korelasi sebesar 0,804 atau 80,4 persen terhadap nilai PAD dimana nilai tersebut yang terendah diantara dua variabel independen lainnya.

**Tabel 2**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension0 1	1.000 <sup>a</sup>	.999	.997	3.557E9

a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum

Dari tabel di atas diperoleh angka R<sup>2</sup> sebesar 0,999 atau 99,9 persen. Hal tersebut menjelaskan bahwa persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 99,9% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 99% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 0,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R Square. Sebagai koefisien determinasi, Adjusted R Square untuk penelitian ini bernilai 0,997 atau 99,7%. Standard Error of the Estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi di dapat nilai 3357E9 atau Rp.3,357 triliun. Hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi angka sebesar Rp. 3,357 triliun.

**Tabel 3**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-8.412E10	2.567E10		-3.277	.189
Dana Alokasi Umum	.426	.053	.683	8.117	.078
Dana Alokasi Khusus	.029	.022	.065	1.326	.411
Dana Bagi Hasil	.939	.345	.276	2.720	.224

a. Dependent Variable: PAD

Dari tabel diatas juga dapat dilihat hubungan antar variabel bebas yang digunakan dengan variabel dependennya, baik itu korelasi positif atau korelasi negatif. Korelasi ini dilihat dari nilai B yang tertera pada tabel. Berdasarkan nilai B maka diperoleh model sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = -8,412E10 + 0,426X_1 + 0,029X_2 + 0,939X_3$$

Dengan Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X<sub>1</sub> : Dana Alokasi Umum (DAU)

X<sub>2</sub> : Dana Alokasi Khusus (DAK)

X<sub>3</sub> : Dana Bagi Hasil (DBH)

Variabel dependen yaitu PAD dipengaruhi oleh tiga variabel predictor yaitu DAU, DAK, dan DBH. Berdasarkan model diatas dapat disimpulkan bahwa variabel DAU memiliki hubungan positif atau berbanding lurus dengan indeks PAD. Maksudnya adalah apabila terdapat peningkatan pada DAU, maka PAD juga meningkat. Begitu juga apabila DAU mengalami penurunan, maka PAD juga menurun. Sama juga dengan variabel DAK yang memiliki hubungan positif atau berbanding lurus dengan PAD. Maksudnya adalah apabila DAK mengalami peningkatan, maka PAD meningkat begitu juga bila DAK menurun maka PAD menurun. Selain itu juga sama halnya dengan variabel DBH yang memiliki hubungan positif atau berbanding lurus. Maksudnya adalah apabila variabel DBH mengalami peningkatan maka PAD juga meningkat, namun apabila variabel DBH mengalami penurunan, maka PAD juga menurun. Dapat juga diketahui apabila setiap penambahan 1% DAU, DAK dan DBH maka nilai PAD juga akan bertambah secara berurutan sebesar 0,426%; 0,029% dan 0,939%.

### **Hubungan Dana Perimbangan dengan Komponen-Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung**

**Tabel 4**  
**Correlations Dana Perimbangan dengan Pajak Daerah**

<b>Correlations</b>			
	DAU	DAK	DBH
Pajak Hotel	0.946	0.602	0.785
Pajak Restoran	0.812	0.992	0.882
Pajak Hiburan	0.940	0.461	0.840
Pajak Reklame	0.862	0.326	0.788
Pajak Penerangan Jalan	0.964	0.531	0.875
Pajak Parkir	0.921	0.542	0.739
Pajak Air Tanah	0.920	0.544	0.736
Pajak Batuan Bukan Logam	-0.883	-0.335	-0.770
Pajak Bumi dan Bangunan	0.982	0.843	0.947
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0.938	0.822	0.847

Dari tabel di atas dapat diketahui yang tiga variabel paling kuat hubungannya antara nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Alokasi Umum (DAU) secara berurutan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hotel sebesar 0,982; 0,964; dan 0,946. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), tiga variabel paling kuat hubungannya dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berurutan yaitu Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan nilai korelasi sebesar 0,992; 0,843; dan 0,822. Terakhir untuk Dana Bagi Hasil (DBH), tiga variabel paling kuat hubungannya dengan nilai

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berurutan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan dengan nilai korelasi sebesar 0,947; 0,882; dan 0,875.

**Tabel 5**  
**Correlations Dana Perimbangan dengan Retribusi Daerah**

Correlations			
	DAU	DAK	DBH
Retribusi Jasa Umum	0.261	0.485	0.098
Retribusi Jasa Usaha	-0.560	0.002	-0.561
Retribusi Perizinan Tertentu	0.883	0.335	0.770

Dari tabel di atas dapat diketahui yang variabel paling kuat hubungannya antara nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 0,883. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), ketiga variabel Retribusi Daerahnya memiliki hubungan yang tidak kuat dengan nilai korelasi yaitu dibawah 0,5. Terakhir untuk Dana Bagi Hasil (DBH), variabel paling kuat hubungannya dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berurutan yaitu Retribusi Perizinan Tertentu sebesar 0,770.

**Tabel 6**  
**Correlations Dana Perimbangan dengan Laba BUMD**

Correlations			
	DAU	DAK	DBH
Laba atas Penyertaan Modal pada PMD	0.997	0.753	0.965

Dari tabel di atas dapat diketahui variabel Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah adalah satu-satunya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laba BUMD. Ketiga variabel Dana Perimbangan memiliki korelasi diatas 0,5 yang berarti hubungannya kuat dan diketahui paling kuat hubungannya antara nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar 0,997.

**Tabel 7**  
**Correlations Dana Perimbangan dengan Pendapatan Lain-Lain**

Correlations			
	DAU	DAK	DBH
Hasil Penjualan Aset	-0.862	-0.302	-0.760
Jasa Giro	-0.001	-0.365	0.122
Bunga Deposito	0.666	0.536	0.224

<b>Correlations</b>			
	DAU	DAK	DBH
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.883	0.335	0.770
Pendapatan dari Pengembalian	-0.134	-0.430	0.011
Penerimaan Lain-Lain	0.666	0.536	0.224
Pendapatan BLUD	0.741	0.621	0.325

Dari tabel di atas dapat diketahui yang tiga variabel paling kuat hubungannya antara nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Alokasi Umum (DAU) secara berurutan yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan BLUD dan Penerimaan Lain-Lain sebesar 0,883; 0,741; dan 0,666. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), tiga variabel paling kuat hubungannya dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berurutan yaitu Pendapatan BLUD, Penerimaan Lain-Lain dan Bunga Deposito dengan nilai korelasi sebesar 0,621; 0,536; dan 0,536. Terakhir untuk Dana Bagi Hasil (DBH), hanya satu variabel kuat hubungannya dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan nilai korelasi sebesar 0,770.

### **Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Kota Akibat Sistem Desentralisasi Fiskal Berdasarkan BWK (Bagian Wilayah Kota) di Kota Bandar Lampung**

- **Pusat Kegiatan Perhotelan di Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan analisis korelasi antara Dana Perimbangan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Hotel didapat hubungan yang sangat kuat sehingga membuktikan bahwa Dana Perimbangan dapat meningkatkan nilai PAD khususnya dari Pajak Hotel. Sebaran lokasi hotel di Kota Bandar Lampung mendominasi di BWK A Tanjung Karang. BWK A berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, kesehatan, dan simpul transportasi. Pusat kegiatan perhotelan ini sebagai pusat pelayanan salah satu jasa yang terletak di BWK A Tanjung Karang dan sebagai salah satu pusat penggerak peningkatan nilai PAD di Kota Bandar Lampung melalui Pajak Daerah.

- **Distribusi Kepadatan Permukiman di Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan analisis korelasi antara Dana Perimbangan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didapat hubungan yang sangat kuat sehingga membuktikan bahwa Dana Perimbangan dapat meningkatkan nilai PAD khususnya dari kedua sumber dana tersebut. PBB sendiri adalah pajak yang dikeakan atas harta tak gerak atau disebut juga dengan pajak objektif [36]. Selain itu juga ada Pajak Daerah berupa Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengenai objek pajak bangunan dan tanah yang dimana baru 12 tahun ini dialihkan menjadi Pajak Daerah dengan maksud penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk Peningkatan PAD [9].

Distribusi kepadatan permukiman di Kota Bandar Lampung mendominasi di BWK A Tanjung Karang dan BWK E Teluk Betung Selatan. BWK A berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, kesehatan, dan simpul transportasi sedangkan BWK E berfungsi sebagai kawasan pelabuhan utama, kawasan industri menengah dan pergudangan, kawasan perdagangan dan jasa, dan penataan kawasan pesisir. Pusat permukiman memang pastinya mendominasi di dua BWK ini sebagai pusat kegiatan ekonomi di BWK A Tanjung Karang dan BWK E Teluk Betung Selatan sebagai pusat pelabuhan atau transit kegiatan ekonomi ke luar Kota Bandar Lampung menggerakkan peningkatan nilai PAD di Kota Bandar Lampung melalui Pajak Daerah dan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Retribusi Daerah.

- **Pusat Kegiatan Hiburan di Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan analisis korelasi antara Dana Perimbangan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Tempat Hiburan didapat hubungan yang sangat kuat sehingga membuktikan bahwa Dana Perimbangan dapat meningkatkan nilai PAD khususnya dari Pajak Tempat Hiburan. Sebaran lokasi tempat hiburan berupa mall dan departemen store di Kota Bandar Lampung mendominasi di BWK A Tanjung Karang. BWK A berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, kesehatan, dan simpul transportasi. Pusat kegiatan hiburan ini sebagai pusat pelayanan salah satu perdagangan dan jasa yang terletak di BWK A Tanjung Karang dan sebagai salah satu pusat penggerak peningkatan nilai PAD di Kota Bandar Lampung melalui Pajak Daerah.

- **Distribusi Kegiatan Transportasi di Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan analisis korelasi antara Dana Perimbangan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Perizinan Tertentu berupa Izin Trayek didapat hubungan yang sangat kuat sehingga membuktikan bahwa Dana Perimbangan dapat meningkatkan nilai PAD khususnya dari Retribusi Perizinan Tertentu. Distribusi trayek angkutan umum di Kota Bandar Lampung bersimpul di BWK A Tanjung Karang. BWK A berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, kesehatan, dan simpul transportasi. Pusat kegiatan ini sebagai pusat simpul transportasi di BWK A Tanjung Karang dan sebagai salah satu pusat penggerak peningkatan nilai PAD di Kota Bandar Lampung melalui Retribusi Daerah sebagai jasa pelayanan angkutan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Hasil dari penelitian mengenai analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan daerah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan analisis regresi linier berganda didapatkan kesimpulan, yakni :

1. Hasil Analisis Korelasi

- a. Adanya keterkaitan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang sangat kuat.
- b. Adanya keterkaitan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sangat kuat.

c. Adanya keterkaitan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang sangat kuat.

2. Hasil Analisis Regresi

a. Secara keseluruhan pengaruh desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung sangat signifikan dan memiliki pengaruh positif.

b. Pengaruh Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung signifikan dan berpengaruh positif.

c. Pengaruh Dana Perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung signifikan dan berpengaruh positif.

Pengaruh Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung signifikan dan berpengaruh positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. P. Saragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta, 2003.
- [2] UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
- [3] UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- [4] Kementerian Keuangan, Laporan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 2017.
- [5] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance, Democratization, Local Government Financial Management*. Yogyakarta, 2002.
- [6] I. Fahmi, *Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan: Kualitatif dan Kuantitatif*. Depok, 2016.
- [7] N. D. Gujarati, *Basic Econometri, Fourth Edition The Mc Graw*. 2004.
- [8] F. E. Oktora dan W. Pontoh, Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountability*, vol. 2, 2013.
- [9] M. H. Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak Daerah*. Yogyakarta, 2010.